

INTISARI

Kondisi masa depan yang tidak pasti serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah membuat pemerintah daerah tersebut harus melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang baik. Selain itu, proses perencanaan dan penganggaran yang baik juga berpengaruh terhadap upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran mulai dari RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan sangat erat, berkelanjutan dan realistis sehingga proses perencanaan dan penganggaran merupakan suatu tahapan yang sangat krusial karena melibatkan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi antara dokumen perencanaan dengan APBD serta menganalisis dan menjelaskan faktor penyebab inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan APBD. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Belu. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis dilakukan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu dengan melakukan integrasi antara dokumen RPJMD, RKPD, PPAS dan APBD untuk mengetahui tingkat konsistensi antara dokumen-dokumen tersebut. Hasil analisis dokumentasi menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat rendah dan rendah pada RKPD terhadap RPJMD dan PPAS terhadap RKPD sedangkan APBD terhadap PPAS menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi dan sangat tinggi. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan belum dijadikan acuan dalam menyusun APBD. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap hasil wawancara dan FGD yang mengarah pada pembentukan lima tema pokok penyebab inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan APBD yaitu: Pertama, sumber daya manusia yang kurang paham tentang proses perencanaan dan penganggaran. Kedua, komitmen dari pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Ketiga, penggunaan aplikasi yang terintegrasi mulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan APBD. Keempat, intervensi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kelima, Kebijakan dari pemerintah pusat.

ABSTRACT

Uncertainty of the future and limited available resources often force local governments to perform careful planning and budgeting. Moreover, a careful process of planning and budgeting will also positively affect the efforts to achieve development goals. Therefore, consistence is essential between planning and budgeting along the processes of RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, and Local Government's Income and Spending Budget (APBD) so that the goals of local governments' development programs can be materialized. Planning and budgeting are two different cycles which should be closely related, continuing, and realistic, therefore, such processes are so crucial that they involve different parties with varying interests.

This research aims to analyze the consistence between the planning documents and the APBD, and to analyze and explain the factors that may cause inconsistency between the planning documents and the APBD. This is a qualitative research which uses a case study approach on Belu Regency Local Government. The data for this research consist of primary and secondary data. Analysis was performed on the planning and budgeting documents, that is, by conducting an integration between documents of RPJMD, RKPD, PPAS, and APBD to determine the consistence levels among the documents. The analysis results show that the consistence level is very low and low between RKPD and RPJMD; and between PPAS and RKPD, whereas the consistence level between APBD and PPAS is high and very high. Therefore, it can be concluded that the planning documents haven't been exploited much as a reference in preparing the APBD. Furthermore, an analysis conducted on the results of interviews and FGD showed five main themes which caused inconsistency between the planning documents and the APBD, namely: one; the human resources are unfamiliar with processes of planning and budgeting, two; commitment from the stakeholders and policy-makers, three; the use of an integrated application starting from the process of document preparation until the process of APBD formulation, four; intervention by the Local House of Representatives (DPRD), five; policy of the central government.